

The Effect Of The Implementation Of The Government's Internal Control System, The Implementation Of Government Accounting Standards, And The Implementation Of Risk Management On The Quality Of Financial Statements

Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, Dan Implementasi Manajemen Resiko Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Tiara Trias Pertiwi^{1*}, Dwi Hariyanti², Ferry Hendro Basuki³

Pasca Sarjana Universitas Pattimura, Indonesia^{1,2,3}

tiaranggit78@gmail.com

*Corresponding Author

ABSTRACT

This research aims to find out empirically about the Implementation of the Government Internal Identification System (SPIP), the Implementation of government accounting standards (SAP), and the Implementation of Risk Management on the Quality of the Ambon City government's Financial Reports. The variables used in this research are the Implementation of the Government Internal Control System (SPIP), the Implementation of government accounting standards (SAP), and the Implementation of Risk Management as independent variables, as well as the quality of financial reports as the dependent variable. The method used to analyze the data is multiple regression statistical analysis. The sample in this study was 74 people consisting of Heads, Secretaries and Heads of Agency and Service divisions. The research results state that the Implementation of the Government Internal Control System/SPIP (X1) has a positive and significant effect on the Quality of Financial Reports (Y) of 0.139 or 13.9%, Implementation of Government Accounting Standards/SAP (X2) has a positive and significant effect on the Quality Financial Reports (Y) amounted to 0.159 or 15.9%, Implementation of Risk Management/MRES (X3) had a positive and significant effect on the quality of Financial Reports (Y) amounted to 0.357 or 35.7%.

Keywords : *Implementation of the Government Internal Identification System (SPIP), Government Accounting Standards (SAP), Implementation of Risk Management on the Quality of Financial Reports*

1. Pendahuluan

Kualitas Laporan Keuangan harus memenuhi syarat normatif seperti tepat waktu, dapat dibandingkan, dan penyajian bebas dari kekeliruan bahkan fraud dan selanjutnya dengan terpenuhinya aspek ini maka Laporan Keuangan pemerintah daerah menjadi informasi yang bermanfaat untuk pembuatan kebijakan pemerintahan dan pelaksanaan Good Governance (Sholohah et al., 2019).

Pemerintah daerah wajib menyajikan Laporan Keuangan yang berkualitas karena banyak pihak yang berkepentingan untuk mengetahui informasi yang ada di Laporan Keuangan untuk kepentingan yang berbeda-beda. Menurut PP No 71 Tahun 2010 yang menggunakan Laporan Keuangan pemerintahan yaitu: masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, mereka yang berperan atau memberi dalam suatu tahapan investasi, pinjaman dan donasi, investasi, serta pihak pemerintah (Ikyarti & Aprilia, 2019).

Laporan Keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dapat menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mewujudkan bentuk akuntabilitas dalam rangka pengelolaan keuangan daerah. menurut (Hapsari, 2023) menyatakan bahwa Laporan Keuangan pemerintah yang buruk dapat menimbulkan implikasi negatif seperti, (a) menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik (pemerintah); (b) investor akan takut menanamkan modalnya karena pelaporan Keuangan tidak dapat diprediksi yang berakibat meningkatnya risiko investasi; (c) para pemberi donor akan mengurangi atau menghentikan

bantuannya; (d) kualitas keputusan menjadi buruk; (e) Laporan Keuangan tidak dapat mencerminkan kinerja aktual.

Badan Pemeriksa keuangan akan menilai Laporan Keuangan dan memberikan opini sebagai salah satu indikator penilaian terhadap kualitas Laporan Keuangan (Justika dkk, 2020). Sebagai bentuk akuntabilitas penilaian pengelolaan APBN di suatu instansi, Laporan Keuangan akan diperiksa dan diberikan opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) sesuai dengan kualitas penyajian data Laporan Keuangan instansi tersebut. Hal tersebut dilakukan sebagai dasar pengambilan kebijakan di masa mendatang, informasi capaian kinerja pelaksanaan APBN kepada masyarakat, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan APBN

Dalam rangka menciptakan akuntabilitas pengelolaan anggaran di suatu instansi, Laporan Keuangan akan melalui proses pemeriksaan dan akan diberikan opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan Laporan Keuangan yang disajikan oleh suatu instansi. Hal itu dilakukan untuk menjadi dasar Ketika akan melakukan pengambilan Keputusan di masa yang akan datang, dapat memberikan informasi kinerja pelaksanaan APBN kepada pihak yang berkepentingan, dan tentunya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan anggaran di pemerintahan (Antika et al., 2020).

Provinsi Maluku, jika dilihat dari Hasil IHPS BPK 2023 terdapat beberapa daerah yang mendapatkan opini *disclaimer* atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP) Khususnya pada Pemerintah Kota Ambon. Laporan opini BPK terlihat memiliki perkembangan yang cukup baik pada tahun 2022 di mana Laporan Keuangan yang mendapatkan WTP sebanyak 6 kabupaten/kota, sama dengan di tahun 2021 yang juga 6 kabupaten/kota, dan jika dibandingkan dengan Tahun 2018 yang hanya mendapatkan WTP di 5 Kabupaten dan Kota. Hanya saja terdapat penurunan opini yang tidak menggembirakan pada Pemerintah Kota Ambon dimana di Tahun 2018 dan 2019 mendapatkan opini WTP namun opininya berubah menjadi WDP ditahun 2020 dan lebih parah lagi yaitu di tahun 2021 dan 2022 masih mendapatkan opini disclaimer atau TMP dua kali secara berurutan.

Sebagai media informasi, Laporan Keuangan harus tersedia dan dapat dipertanggungjawabkan dan bebas dari salah saji dan praktik kecurangan (RAMADHAN & LAKSITO, 2019). Permasalahan pada inefisiensi pengguna anggaran, fungsi pengawasan yang baik terkait Laporan Keuangan tidak berjalan, kesalahan penginputan data serta masih rendahnya pemahaman dan loyalitas para pengelola keuangan terhadap penerapan akuntansi pemerintah memungkinkan timbulnya risiko terhadap Laporan Keuangan.

Pengelolaan keuangan daerah di provinsi maluku dapat dikatakan belum maksimal khususnya di Kota Ambon di mana Laporan Keuangan yang dihasilkan masih diberikan pendapat disclaimer atau Tidak memberikan pendapat (TMP). Ini membuktikan bahwa Laporan Keuangan pemerintah daerah Kota Ambon belum benar-benar bersih tanpa adanya temuan-temuan yang material oleh BPK RI. Masih lemahnya pengendalian internal merupakan salah satu temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI yang menyebabkan pengelolaan keuangan daerah belum memadai. Salah satu indikator yang menunjukkan bahwa SPIP tersebut belum memadai dapat ditunjukkan pada tingkat maturitas yang dicapai PEMDA.

Ketidak konsistenan tingkat maturitas ini dengan opini BPK diduga menjadi penyebab banyaknya temuan-temuan yang menjadi rekomendasi BPK untuk diperbaiki oleh PEMDA meskipun PEMDA telah mendapatkan opini WTP.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI pada dasarnya untuk memahami sistem pengendalian internal secara menyeluruh, penetapan risiko pengendalian, pengujian catatan akuntansi dan pengujian atas respon pertanyaan serta memastikan pemerintah daerah memiliki sistem pengendalian internal yang memadai (Permata et al., 2022).

Masih terdapatnya perbedaan hasil penelitian mengenai penerapan SPIP dan penerapan SAP dalam menjamin Kualitas Laporan Keuangan ini menyebabkan tidaklah mengherankan jika temuan pada LHP BPK masih cukup material atas Laporan keuangan. Hal ini

pada akhirnya menimbulkan sebuah pertanyaan besar mengenai kualitas Laporan Keuangan daerah pada khususnya dan kinerja keuangan Pemerintah Daerah pada umumnya.

Melihat besarnya dampak dari penerapan manajemen risiko pada sektor swasta khususnya perbankan, serta tuntutan tata kelola yang semakin baik pada sektor publik menjadikan manajemen risiko tidak hanya menjadi sebuah alternative pilihan melainkan menjadi sebuah keharusan terutama pada pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Mardiasmo, 2021).

Mengingat sejauh ini penelitian terkait dampak manajemen risiko hanya dilakukan pada entitas swasta dengan orientasi laba, sedangkan pada institusi publik belum begitu banyak dikenal, dengan demikian akan sangat menarik bila penelitian terhadap sektor publik ini memasukkan unsur manajemen risiko sebagai salah satu variabel, dan meskipun banyak penelitian terdahulu terkait implementasi SPIP namun masih terdapat perbedaan hasil penelitian, begitu juga terkait implementasi SAP.

2. Tinjauan Pustaka

Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan (Ramdani & Agustina, 2019). Untuk itu dapat diartikan bahwa kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud. Laporan Keuangan sektor publik pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban ke masyarakat, pemerintah meningkatkan akuntabilitas publik dengan menyajikan Laporan Keuangan. (Yanuarisa, 2020) menjelaskan akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik (Sugiarto, 2024). Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Sistem Pengendalian Intern menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan Keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarannya (Rahayu et al., 2020). Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah merupakan implementasi PP No. 60 tahun 2008 kepada seluruh pegawai yang bekerja di instansi pemerintahan. SPIP ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan

penyelenggaraan administrasi pemerintah yang pasti dan menghindari berbagai bentuk penyimpangan yaitu dibentuknya Standard Operating Procedures (SOP).

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan Keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berbicara tentang penerapan SPIP pada PEMDA tak terlepas dari penilaian maturitas dari 0–5. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010, terkait SAP pada Pasal 1 ayat 4 dan ayat 5 bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disebut SAP, yaitu suatu prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam membuat dan melakukan penyusunan dan Laporan Keuangan yang disajikan untuk pemerintah. Ardianto dan Eforis, 2019 menyatakan bahwa implementasi standar akuntansi pemerintah (SAP) merupakan penggunaan prinsip-prinsip akuntansi pemerintah dalam menyusun Laporan Keuangan pemerintah daerah.

Pada prinsipnya Laporan Keuangan yang berkualitas merupakan Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan ketentuan atau standar keuangan yang berlaku. Penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010, yang mensyaratkan pengelolaan keuangan dengan basis Akrua harus di ikuti oleh Pemerintah Daerah yang selama ini menyelenggarakan pengelolaan keuangan berdasarkan basis kas menggunakan standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2005.

SAP digunakan sebagai basis dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan pemerintah. Payung hukum penerbitan SAP terdiri dari Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang- Undang No. 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Payung hukum ini menjadikan SAP menjadi patokan yang wajib untuk semua instansi pemerintah baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Wulandari & Daulay, 2024).

SAP merupakan pedoman dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan pemerintah, merupakan satu bentuk nyata pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. SAP ini lahir setelah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang salah satu isinya mensyaratkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun APBD bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban tersebut haruslah disajikan sesuai dengan SAP, dari Undang-undang tersebut menjadi dasar diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Implementasi Manajemen Risiko (MRES)

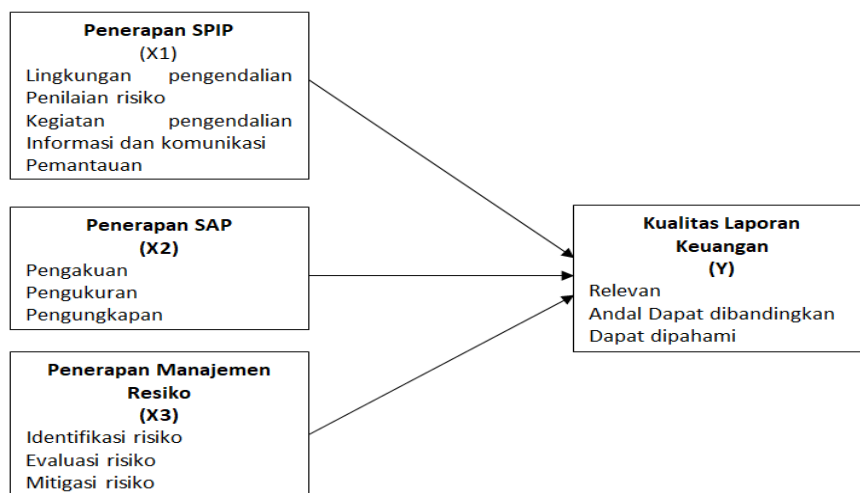
Definisi risiko adalah dampak dari ketidakpastian terhadap pencapaian objektif (Qintharah, 2019). Dampak menurut ISO 31000 adalah deviasi dari apa yang diharapkan dan bisa bersifat positif atau negatif. Risiko juga merupakan sebagai suatu kejadian yang mungkin terjadi dan apabila terjadi akan memberikan dampak negatif pada pencapaian tujuan instansi pemerintah (PP Nomor 60 Tahun 2008). Menurut (Jikrillah et al., 2021) risiko adalah suatu peristiwa yang merupakan kombinasi dari probabilitas atas suatu kejadian dan konsekuensinya yang mungkin dapat terjadi sehingga akan berdampak atas tercapainya suatu tujuan. Risiko merupakan konsep yang digunakan oleh auditor dan manajemen untuk menyatakan perhatian mereka tentang dampak yang mungkin terjadi atas lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian. Setiap peristiwa yang terjadi dapat mempunyai dampak yang material atau

konsekuensi yang signifikan bagi organisasi dan tujuan organisasi. Akibat yang bersifat negatif disebut dengan risiko (risk) dan akibat yang bersifat positif disebut dengan kesempatan (opportunities).

Menurut ISO 31000 manajemen risiko adalah kegiatan organisasi yang terarah dan koordinasi terkait dengan pengelolaan risiko. Menurut (Permenkeu RI Nomor 171/PMK.01/2016) manajemen risiko merupakan budaya, struktur yang diarahkan untuk proses, dan memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi dengan mengelola risiko pada tingkat yang dapat diterima. Penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, serta pemantauan/dan revidi merupakan proses manajemen risiko.

(Supriyadi & Setyorini, 2020) menyatakan bahwa manajemen risiko diartikan sebagai pengungkapan atas risiko-risiko yang telah dikelola perusahaan, atau bagaimana perusahaan dalam mengelola risiko dimasa mendatang dan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan.

Manajemen risiko merupakan hal wajib bagi instansi pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, bahwa setiap instansi wajib melaksanakan manajemen risiko guna mencapai tujuan instansi. Manajemen risiko bisa diartikan dengan mudah sebagai suatu sistem pengelolaan risiko secara komprehensif guna meminimalisir atau menghilangkan potensi-potensi risiko yang mungkin muncul dalam dalam upaya organisasi untuk mencapai tujuannya (Radiansyah et al., 2023).



Gambar 1. Model Penelitian

3. Metode Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, adalah dimaksudkan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi dari variabel yang diteliti dan melakukan verifikasi terhadap keseluruhan variabel secara empiris. Untuk itulah Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif verifikasi. Metode penelitian yang digunakan dipilih dengan menggunakan metode survey. Adapun ciri-ciri dari metode survey adalah tujuannya dapat bersifat deskriptif juga verifikasi, data dikumpulkan dari sampel yang telah ditentukan, data variabel penelitian dijamin dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu, yaitu dengan menggunakan kuesioner (Sugiono, 2004). Penelitian ini menguji Pengaruh Implementasi SPIP, Implementasi SAP dan Implementasi Manajemen Risiko terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Periode waktu yang digunakan adalah Cross-sectional yaitu fakta sesaat berupa data yang hanya dapat digunakan sekali dalam suatu periode pengamatan (Hadi Ismanto & Pebruary, 2021). Sedangkan menurut (Sahab, 2019) Cross-sectional (studi silang tempat) dilaksanakan satu kali dan mencerminkan potret dari suatu keadaan pada suatu saat tertentu.

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara yang terlibat di dalam penyusunan Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sedangkan Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut: 1). Kepala Dinas dan Badan, 2). Sekertaris Dinas dan Badan, 3).Kepala Bidang.

Total Responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 74 orang yang terdiri dari Kepala, Sekretaris, dan Kepala Bidang yang berada di Badan dan Dinas masing-masing berjumlah 3 orang kecuali inspektorat berjumlah 2 orang. Adapun pemilihan responden didasarkan pada pemilihan Aparatur Sipil Negara yang terlibat di dalam penyusunan Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas dan Badan. Sampel ini dipilih merujuk pada lembaga yang melakukan proses penyusunan Laporan keuangan serta merupakan lokasi di mana SPIP dilaksanakan dan salah satu unit di mana SAP diterapkan dalam menyusun Laporan Keuangan, selain itu pelaksanaan manajemen resiko juga dilaksanakan pada Dinas dan badan.

Metode Analisis Regresi Berganda digunakan untuk mengetahui Implementasi SPIP (X1), Implementasi SAP (X2), dan Implementasi Manajemen Resiko (X3) terhadap Kualitas Laporan Keuangan. (Y).

4. Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Data Responden

Penelitian ini telah menyebarkan sebanyak 74 kuesioner untuk diisi oleh responden penelitian. Sampel dari Dinas dan Badan Pemerintah Kota Ambon terdiri dari Kepala Dinas dan Badan, Sekertaris Dinas dan Badan dan Kepala bidang.

Data penelitian ini mula-mula dikumpulkan melalui kuesioner penelitian yang disampaikan secara langsung kepada Responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini yakni Kepala Dinas dan Badan, Sekertaris Dinas dan Badan dan Kepala bidang di Kota Ambon. Kuesioner disertai surat permohonan kesediaan menjadi responden dan penawaran ringkasan hasil penelitian. Dari 74 kuesioner yang diberikan kepada responden, hanya 68 responden yang datanya dapat diolah karena beberapa responden tidak mengisi kuesioner dengan lengkap (seperti tidak ada kejelasan data responden dan serta tidak ada jawaban pengisian terhadap butir/item pernyataan, serta kondisi jawaban yang rusak yang tidak dapat diketahui atau diinterpretasikan jawabannya).

Tabel 1. Gambaran Hasil Penyebaran Kuesioner

Keterangan	Jumlah	%
Kuesioner yang dikirim	74	100
Kuesioner yang tidak kembali	(6)	8,11
Kuesioner yang dapat diolah	68	91,89

Sumber : Hasil olah data penelitian (2024)

Hasil Pengujian Validitas.

Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang dirancang dalam bentuk kuesioner benar-benar dapat menjalankan fungsinya. Seperti telah dijelaskan pada metodologi penelitian bahwa untuk menguji valid tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika, yaitu melalui nilai koefisien korelasi skor butir pernyataan dengan skor totalnya. Apabila koefisien korelasi butir pernyataan dengan skor total item lainnya $\geq 0,30$ maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Kuesioner Implementasi SPIP

Butir Pertanyaan	Indeks Validitas	Nilai Kritis (r tabel)	Keterangan
Item Q1.1	.801**	0,235	Valid
Item Q1.2	.865**	0,235	Valid
Item Q1.3	.785**	0,235	Valid
Item Q1.4	.819**	0,235	Valid
Item Q1.5	.474**	0,235	Valid
Item Q1.6	.731**	0,235	Valid
Item Q1.7	.828**	0,235	Valid
Item Q1.8	.823**	0,235	Valid
Item Q1.9	.460**	0,235	Valid
Item Q1.10	.814**	0,235	Valid
Item Q1.11	.794**	0,235	Valid
Item Q1.12	.430**	0,235	Valid
Item Q1.13	.878**	0,235	Valid
Item Q1.14	.787**	0,235	Valid

Sumber : Hasil olah data penelitian (2024)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai indeks validitas setiap butir pernyataan lebih besar dari nilai r tabel 0,235 maka keseluruhan item kuesioner dari Variabel Implementasi SPIP dinyatakan Valid sehingga dapat dilakukan pengujian untuk tahapan selanjutnya.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Kuesioner Implementasi SAP

Butir Pertanyaan	Indeks Validitas	Nilai Kritis	Keterangan
Item Q2.15	.801**	0,235	Valid
Item Q2.16	.865**	0,235	Valid
Item Q2.17	.785**	0,235	Valid
Item Q2.18	.819**	0,235	Valid
Item Q2.19	.474**	0,235	Valid
Item Q2.20	.731**	0,235	Valid
Item Q2.21	.828**	0,235	Valid
Item Q2.22	.823**	0,235	Valid
Item Q2.23	.460**	0,235	Valid
Item Q2.24	.814**	0,235	Valid
Item Q2.25	.794**	0,235	Valid
Item Q2.26	.430**	0,235	Valid
Item Q2.27	.878**	0,235	Valid
Item Q2.28	.787**	0,235	Valid
Item Q2.29	.794**	0,235	Valid
Item Q2.30	.430**	0,235	Valid
Item Q2.31	.878**	0,235	Valid
Item Q2.32	.787**	0,235	Valid

Sumber : Hasil olah data penelitian (2024)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai indeks validitas setiap butir pernyataan lebih besar dari nilai r tabel 0,235 maka keseluruhan item kuesioner dari Variabel Implementasi SAP dinyatakan Valid sehingga dapat dilakukan pengujian untuk tahapan selanjutnya.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Implementasi Manajemen Resiko (MRES)

Butir Pertanyaan	Indeks Validitas	Nilai Kritis	Keterangan
Item Q3.33	.270*	0,235	Valid
Item Q3.34	.522**	0,235	Valid
Item Q3.35	.424**	0,235	Valid
Item Q3.36	.287*	0,235	Valid
Item Q3.37	.571**	0,235	Valid
Item Q3.38	.374**	0,235	Valid
Item Q3.39	.569**	0,235	Valid
Item Q3.40	.486**	0,235	Valid
Item Q3.41	.605**	0,235	Valid
Item Q3.42	.602**	0,235	Valid
Item Q3.43	.540**	0,235	Valid
Item Q3.44	.304*	0,235	Valid
Item Q3.45	.526**	0,235	Valid
Item Q3.46	.429**	0,235	Valid
Item Q3.47	.245*	0,235	Valid
Item Q3.48	.335**	0,235	Valid
Item Q3.49	.349**	0,235	Valid
Item Q3.50	.329**	0,235	Valid
Item Q3.51	.117**	0,235	Unvalid

Sumber : Hasil olah data penelitian (2024)

Pada tabel di atas dapat dilihat nilai indeks validitas setiap butir pernyataan lebih besar dari nilai r tabel 0,235 terkecuali pada kuesioner item Q3.51 yang menunjukkan hasil r hitung adalah sebesar 0.117. atau < dari 0,235. Hasil uji ini mengindikasikan bahwa semua butir pertanyaan yang diajukan pada variabel Implementasi Manajemen Resiko (MRES) valid dan layak digunakan sebagai alat ukur untuk penelitian dan dapat diikuti sertakan pada analisis selanjutnya terkecuali item Q3.51 tersebut.

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan (KLK)

Butir Pertanyaan	Indeks Validitas	Nilai Kritis	Keterangan
Item Q4.52	.645**	0,235	Valid
Item Q4.53	.608**	0,235	Valid
Item Q4.54	.602**	0,235	Valid
Item Q4.55	.602**	0,235	Valid
Item Q4.56	.597**	0,235	Valid
Item Q4.57	.683*	0,235	Valid
Item Q4.58	.699**	0,235	Valid
Item Q4.59	.643**	0,235	Valid
Item Q4.60	.648**	0,235	Valid
Item Q4.61	.626**	0,235	Valid

Item Q4.62	.403**	0,235	Valid
Item Q4.63	.641**	0,235	Valid
Item Q4.64	.307*	0,235	Valid
Item Q4.65	.347**	0,235	Valid

Sumber : Hasil olah data penelitian (2024)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai indeks validitas setiap butir pernyataan lebih besar dari nilai r tabel 0,235 maka keseluruhan item kuesioner dari Variabel Kualitas Laporan Keuangan dinyatakan Valid sehingga dapat dilakukan pengujian untuk tahapan selanjutnya.

Hasil Pengujian Reliabilitas

Selain valid, alat ukur juga harus memiliki keandalan atau reliabilitas, suatu alat ukur dapat diandalkan jika alat ukur tersebut digunakan berulang kali akan memberikan hasil yang relatif sama (tidak berbedda jauh). Untuk melihat andal tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika, yaitu melalui koefisien reliabilitas. Apabila koefisien reliabilitas lebih besar dari 0.70 maka secara keseluruhan pernyataan dinyatakan andal (reliabel). Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan metode *alpha-cronbach* diperoleh hasil uji reliabilitas sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Penelitian

Kuesioner	Jumlah Pertanyaan	Koefisien Reliabilitas	Keterangan
Implementasi SPIP	14	0,937	Reliabel
Implementasi SAP	18	0,871	Reliabel
Implementasi Manajemen Resiko	19	0,733	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan	14	0,844	Reliabel

Sumber : Hasil olah data penelitian 2024

Sesuai dengan hasil uji yang diperlihatkan pada ke empat variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai *Cronbach alpha* diatas nilai 0.70 dengan demikian dapat dikatakan bahwa indikator-indikator pertanyaan pada ke tiga variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.

Estimasi Model Regresi

Analisis regresi digunakan untuk menguji perubahan yang terjadi pada kualitas laporan keuangan yang dapat diterangkan atau dijelaskan oleh perubahan ketiga variabel independen (Implementasi Sistem pengendalian internal pemerintah/SPIP, Implementasi standar akuntansi pemerintah/SAP dan Implementasi manajemen resiko/MRES). Berdasarkan hasil pengolahan data pengaruh Implementasi Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP), Implementasi standar akuntansi pemerintah (SAP) dan Implementasi manajemen resiko (MRES) terhadap kualitas laporan keuangan di peroleh hasil regresi sebagai berikut.

Tabel 7. Hasil Regresi

Model	Unstandardized B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	-3.409	5.890		-.432	.667
X1 SPIP	.385	.074	.331	2.153	.025
X2 SAP	.298	.082	.274	2.412	.019
X3 MRES	.555	.083	.589	6.681	.000

Sumber : Output SPSS (2024)

Berdasarkan hasil pengolahan data seperti diuraikan pada tabel diatas maka dapat dibentuk persamaan regresi variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Standar Akuntansi Pemerintah dan Manajemen Resiko terhadap kualitas laporan keuangan sebagai berikut:

$$KLK = -3,409 + 0,385 \text{ SPIP} + 0,298 \text{ SAP} + 0,555 \text{ MRES}$$

Pada persamaan regresi diatas, dapat dilihat koefisien regresi dari kedua variabel independen bertanda positif yang menunjukkan bahwa Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Implementasi Manajemen Resiko (MRES) yang baik akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan (KLK) pada Pemerintah Kota Ambon. Selanjutnya untuk menguji apakah Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Implementasi Manajemen Resiko (MRES) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan secara statistik, baik secara bersama-sama (simultan) maupun secara parsial (individual), maka dilakukan uji signifikansi. Pengujian dimulai dari pengujian simultan, dan apabila hasil pengujian simultan signifikan dilanjutkan dengan uji parsial.

Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji-t)

Tabel 8. Hasil Uji-t

Model	Unstandardized B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	-3.409	5.890		-.432	.667
X1 SPIP	.385	.074	.331	2.153	.025
X2 SAP	.298	.082	.274	2.412	.019
X3 MRES	.555	.083	.589	6.681	.000

Sumber : Output SPSS (2024)

Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dugaan sementara bahwa Implementasi Sistem Pengendalian Internal pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Ambon. Berdasarkan data keluaran software SPSS seperti disajikan pada tabel 4.21 diperoleh nilai thitung variabel Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebesar 2,153. Karena nilai thitung (2,153) lebih besar dari ttabel (1,998) maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho dan menerima Ha, artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa Implementasi SPIP berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (KLK). Hasil pengujian ini memberikan bukti empiris bahwa pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang baik akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan pemerintah kota Ambon.

Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dugaan sementara Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ambon. Berdasarkan data keluaran software SPSS seperti disajikan pada tabel diatas diperoleh nilai thitung variabel Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebesar 2.412. Karena nilai thitung (2.412) lebih besar dari ttabel (1,998) maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho dan menerima Ha, artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil

pengujian ini memberikan bukti empiris bahwa Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang baik akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ambon.

Pengaruh Implementasi Manajemen Resiko (MRES) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dugaan sementara Implementasi Manajemen Resiko (MRES) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ambon. Berdasarkan data keluaran software SPSS seperti disajikan pada tabel diatas diperoleh nilai thitung variabel Implementasi Manajemen Resiko (MRES) sebesar 6.681. Karena nilai thitung (6.681) lebih besar dari ttabel (1,998) maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho dan menerima Ha, artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa Implementasi Manajemen Resiko (MRES) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil pengujian ini memberikan bukti empiris bahwa Implementasi Manajemen Resiko (MRES) yang baik akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Ambon.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan suatu nilai yang menyatakan besar pengaruh secara simultan semua variabel independen terhadap variabel dependen. Pada permasalahan yang diteliti yaitu pengaruh Implementasi Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP), Implementasi standar akuntansi pemerintah (SAP) dan implementasi Manajemen resiko (MRES) terhadap Kualitas Laporan Keuangan diperoleh koefisien determinasi sebagai berikut.

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.709	.655	.479	3.15617
a. Predictors: (Constant), X3_MRES, X1_SPIP, X2_SAP				
b. Dependent Variable: Y_KLK				

Sumber : *Otput data statistik penelitian (2024)*

Nilai R pada tabel diatas menunjukkan kekuatan hubungan ketiga variabel independen (Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah/SPIP, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah/SAP dan Implementasi Manajemen Resiko/MRES) dengan Kualitas Laporan Keuangan. Jadi pada Pemerintah Kota Ambon diketahui bahwa secara simultan ketiga variabel independen (Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah/SPIP, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah/SAP dan Implementasi Manajemen Resiko/MRES) memiliki hubungan yang kuat dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ambon.

Sementara nilai R-Square sebesar 0,655 atau 65,5 persen menunjukkan bahwa pada Pemerintah Kota Ambon, variabel Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), dan Implementasi Manajemen Resiko (MRES) secara simultan mampu menerangkan perubahan yang terjadi pada kualitas laporan keuangan sebesar 65,5%. Dengan kata lain Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Sistem Akuntansi Pemerintah, dan Implementasi Manajemen Resiko secara bersama-sama memberikan kontribusi atau pengaruh sebesar 65,5%. terhadap perubahan Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Kota Ambon. Sisanya pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diamati adalah sebesar 34,5% merupakan pengaruh faktor lain diluar variabel Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), dan Implementasi Manajemen Resiko (MRES).

Berdasarkan hasil perhitungan besar pengaruh/kontribusi masing-masing variabel independen terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ambon dapat diketahui bahwa diantara ketiga variabel independen, Implementasi Manajemen resiko (MRES)

memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Ambon.

5. Penutup

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- 1). Implementasi Sistem Pengendalian internal Pemerintah/SPIP (X1) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y).
- 2). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan/SAP (X2) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y).
- 3). Implementasi Manajemen Resiko/MRES (X3) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan (Y).
- 4). Implementasi Sistem Pengendalian internal Pemerintah/SPIP (X1), Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan/SAP (X2) dan Implementasi Manajemen Resiko/MRES (X3) berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas laporan keuangan (Y).

Daftar Pustaka

- Antika, Z., Murdayanti, Y., & Nasution, H. (2020). Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan, dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 15(2), 212–232.
- Hadi Ismanto, S. E., & Pebruary, S. (2021). *Aplikasi SPSS dan eviews dalam analisis data penelitian*. Deepublish.
- Hapsari, S. P. R. (2023). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Dukungan Manajemen Puncak Terhadap Sistem Informasi Manajemen Daerah Dan Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan*. UPN Veteran Jawa Timur.
- Ikyarti, T., & Aprila, N. (2019). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, implementasi sistem informasi manajemen daerah, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 131–140.
- Jikrillah, S., Ziyad, M., & Stiadi, D. (2021). Analisis manajemen risiko terhadap keberlangsungan usaha UMKM di Kota Banjarmasin. *JWM (Jurnal Wawasan Manajemen)*, 9(2), 134–141.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Permata, Lady, SRI, R., & Friyani, R. (2022). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Auditor Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jambi)*. UNIVERSITAS JAMBI.
- Qintharah, Y. N. (2019). Perancangan penerapan manajemen risiko. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 10(1), 67–86.
- Radiansyah, A., Baroroh, N., Fatmah, F., Hulu, D., Syamil, A., Siswanto, A., Violin, V., Purnomo, I. C., & Nugroho, F. (2023). *MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN: Teori & Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rahayu, S. P., Fitrioso, R., & Paulus, S. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Tekanan Eksternal, Komitmen Organisasi, Dan Sistem pengendalian Intern Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 69–82.
- RAMADHAN, I., & LAKSITO, H. (2019). *PERAN RASIO KEUANGAN SEBAGAI ALAT ANALISIS UNTUK MENDETEKSI KECURANGAN PELAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus pada Perusahaan Non Keuangan yang Terkena Sanksi Penyajian Laporan Keuangan dari OJK dalam Kategori Peringatan VIII. G. 7 Periode 2010-2016)*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Ramdani, E., & Agustina, N. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

- Berbasis AkruaI Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan*, 5(1), 1–10.
- Sahab, A. (2019). *Buku ajar analisis kuantitatif ilmu politik dengan SPSS*. Airlangga University Press.
- Sholohah, S. A., Sulistyawati, A. I., & Santoso, A. (2019). Kualitas laporan keuangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Indonesia Accounting Journal*, 1(2), 45–56.
- Sugiarto, I. (2024). *Peran Akuntansi Pemerintahan Dalam Rangka Membangun Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah*.
- Sugiono. (2004). Konsep, Identifikasi, Alat Analisis dan Masalah Penggunaan Variabel Moderator. *Studi Manajemen & Organisasi*, 1(2), 61–70.
- Supriyadi, A., & Setyorini, C. T. (2020). Pengaruh pengungkapan manajemen risiko terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan di industri perbankan Indonesia. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 4(2), 467–484.
- Wulandari, S., & Daulay, A. N. (2024). Analisis Penerapan Standart Akuntansi Pemerintah di Kantor Camat Sei Balai. *Jurnal Rimba: Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2), 332–339.
- Yanuarisa, Y. (2020). Akuntabilitas pengelolaan keuangan yayasan yusuf arimatea palangka raya. *Balance: Media Informasi Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 90–103.